

LAPORAN NOTULA

Penyusunan Agenda Kokreasi Aksi Beneficial Ownership RAN OGI VII 2023-2024

Jumat, 11 November 2022 | 14.00 – 16.00

PENDAHULUAN

Sekretariat Open Government Indonesia sedang melaksanakan penyusunan Rencana Aksi Nasional OGI VII Tahun 2023-2024. Salah satu aksi yang diusulkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) berkaitan dengan Beneficial Ownership. Sekretariat Open Government Indonesia memfasilitasi pertemuan antara OMS dengan K/L terkait, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) guna memberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait aksi BO yang ingin didorong dalam RAN OGI VII Tahun 2023-2024.

TUJUAN

1. Pendalaman aksi terkait Beneficial Ownership dari OMS
2. Mengadvokasikan agenda kokreasi antara K/L dengan OMS dalam rangka aksi Beneficial Ownership RAN OGI VII 2023-2024.

PEMBAHASAN

1. **Theodorus Agustinus H.** Mewakili Sekretariat Open Government Indonesia memberikan pengantar terkait agenda Kokreasi RAN OGI VII sebagai berikut.
 - a. Sekretariat Open Government Indonesia merupakan sekretariat yang dibuat dalam rangka berpartisipasinya Indonesia dalam kesepakatan multilateral, yaitu Open Government Partnership. Sekretariat Open Government Indonesia memiliki lima nilai yang didorong dalam praktiknya, yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, inovasi dan inklusivitas.
 - b. Dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia VII Tahun 2023-2024, Sekretariat OGI membuka kesempatan bagi OMS untuk memberikan usulan aksi, salah satu aksi yang diusulkan oleh OMS adalah Keterbukaan Data Beneficial Ownership. Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan untuk mendorong perbaikan data dan juga akuntabilitas data Beneficial Ownership di Indonesia.
2. **Bapak Timer Manurung**, dari Yayasan Auriga Nusantara, mewakili OMS pengusul aksi Beneficial Ownership memberikan penjelasan singkat terkait aksinya sebagai berikut:
 - a. Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mendorong hadirnya perbaikan pada tiga hal dalam tata kelola keterbukaan data Beneficial Ownership, yaitu (1) tersedianya data yang terstandarisasi; (2) data yang akuntabel melalui verifikasi; (3) meningkatkan pemanfaatan data oleh Kementerian/Lembaga terkait.
 - b. Dalam aksi tersebut, CSO memiliki peran untuk meningkatkan dan menemukan berbagai inovasi dalam meningkatkan akuntabilitas data atau informasi terkait Beneficial Ownership. Namun tantangannya adalah akses data yang sampai saat ini OMS bisa dapati sangat rumit, OMS mengharapkan adanya keterbukaan dalam berbagipakai data BO melalui dibukanya akses API atau backend dari portal AHU supaya dapat dimanfaatkan oleh OMS.

3. **Ibu Laila Yunara**, dari Direktorat Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memberikan tanggapan terkait dengan usulan OMS sebagai berikut:
 - a. Penunjukkan Ditjen AHU Kemenkumham sebagai penanggung jawab terkait verifikasi dinilai tidak tepat. Posisi Ditjen AHU, khususnya terkait data yang ada pada portal www.bo.ahu.go.id merupakan data yang disupply dari K/L teknis, dan posisi AHU hanya membuka atau mempublikasikan data-data tersebut.
 - b. Terkait dengan keterbukaan data, dalam rekomendasi FATF 24, dijelaskan bahwa keterbukaan data disebutkan hanya dibuka untuk aparat penegak hukum (APGAKUM). Untuk mendorong keterbukaan yang seluas-luasnya untuk saat ini merupakan suatu hal yang ideal, tetapi belum tentu dapat dikerjakan. Kemenkumham saat ini fokus untuk membangun dari sistem yang sudah tersedia. Apabila rekan-rekan AURIGA memiliki keinginan untuk dapat mengakses data API, hal tersebut perlu dikoordinasikan pada tingkat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dikarenakan kewenangannya tidak pada direktorat terkait.
4. **Bapak Fahrurrozi**, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga memberikan tanggapan terkait proposal usulan OMS sebagai berikut:
 - a. Data terkait BO di Ditjen AHU saat ini menarik data yang ada dari K/L Teknis terkait. Idealnya, data BO harusnya juga dapat diverifikasi di AHU, tetapi lebih dari itu seharusnya di tingkat K/L yang bertanggung jawab atas data tersebut juga melakukan verifikasi sebelum data diberikan kepada Ditjen AHU.
5. **Ibu Juhanah** dari Sekretariat Stranas PK memberikan informasi terkait Rencana Aksi Beneficial Ownership dalam RAN Stranas PK sebagai berikut:
 - a. Aksi BO yang akan didorong melalui stranas PK ialah terdiri dari: (1) percepatan deklarasi BO agar memperoleh hasil yang optimal; (2) membangun mekanisme verifikasi data BO. Stranas telah melakukan MoU, tetapi pelaksanaan belum maksimal, khususnya terkait integrasi data NIK dan juga NPWP; (3) pemanfaatan data BO oleh berbagai K/L
 - b. Terkait dengan penetapan aksi akan dilakukan pada pertengahan Desember 2022
6. **Bapak Hilman** dari Yayasan Auriga Nusantara memberikan tanggapan atas masukan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:
 - a. Semua masukan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan ditindaklanjuti melalui penyusunan matriks yang lebih jelas dan juga rinci mengenai kegiatan yang diharapkan. Harapannya setelah pertemuan ini rekan-rekan CSO semakin terpetakan terkait dengan unit kerja yang bertanggung jawab. Sehingga pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi Open Government Indonesia VII 2023-2024, dapat ditindaklanjuti lebih dalam matrik OGI.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pertemuan pertama terkait dengan Beneficial Ownership didapati masukan-masukan dari Kemenkumham terkait dengan aksi yang ingin dilakukan. CSO perlu merincikan terkait dengan aksi serta unit kerja sampai dengan output yang diharapkan. Perincian dapat dilakukan melalui format matriks yang dimiliki Sekretariat OGI agar dapat dilengkapi oleh rekan-rekan CSO.

Dokumentasi

